



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0013.5.1.02.02.01.0026
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah Anggaran (DPA) : 36,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 36,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA LP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				15,000,000.00
2	22 Agustus 2024	00515	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	3,000,000.00	12,000,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	3,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	21,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	24,000,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGELOMPOK ANGGARAN
BALITBARDA
NIRMALANUSWATI MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Makassar, 21 Agustus 2024

Kepada Yth.

PT. Bank SULSELIA Cabang Utama Makassar

Nomor : 00330/SP/BLT/PTD/2024

Perihal : Pemindahbukuan

Lampiran : 2

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahbukukan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000316367
Atas Nama : BEMAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir
Jenis WP :
Uraian : BELANJA JAGA TERAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGUKUHAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PERATURAN BAKU/DAUR/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	DUR KEGIATAN KODE REKOMENDASI	URAIAN	JMLAH
1	1.05.02.2.01.0013.1.1.02.02.01.0026	Sub kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru terhadap Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Rekening Belanja Jaga Teraga Administrasi	1.000.000.00
Jumlah Pembukuan			1.000.000.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JMLAH
1	144.000.3109012006	Juran Jaminan Kesehatan 1%	702400211354790	72.000.00
2	17025401000/ Bank BPD Subellur	Jaminan Hari Tua (JHT)		171.000.00
Jumlah Potongan				243.000.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Neto yang ditransfer				2.756.000.00

Unggahannya : (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 21 Agustus 2024
BEMAHARA PENGELUARAN

STANIS ASSYRI S.KH
NIP : 19600320 201410 2 001

X 00°00'00"E 4 00°00'00"E : [2014] [1914]

Y 00°29'00"E
Y 00°29'00"E
Y 00°00'00"E
W 00°00'00"E

4 00°00'00"E

[2014] [1914] [2014] [1914]
[2014] [1914] [2014] [1914]
[2014] [1914] [2014] [1914]
[2014] [1914] [2014] [1914]
[2014] [1914] [2014] [1914]
[2014] [1914] [2014] [1914]

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0013.5.1.02.02.01.0026

Buku Kas No. : 00515

Tanggal : 22-08-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TIGA JUTA RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN HUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 3.000.000,-

MENGETAHUI

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAERAH SELAKU PPTK


DODY AGRIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741216 199311 1 001

Makassar, 22-08-2024
Yang Menerima,



NO. DAFTAR: 00215/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 346/setda/188.4/TAHUN 2024 / 11 Januari 2024
 Kegiatan : 5.05.02.2.01 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0013 / Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
 Rekening : 5.1.02.02.01.0026 / Belanja Jasa Tenaga Administrasi

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	SRI WINARTY B. MANGAWEANG 66.663.641.3-804.000 Rekening : 1302010000507573	Jasa Administrasi - Perjanjian/Perikatan Kerja (Kantor) / Tenaga Kontrak	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	1 
2	SINTIA YULIANTI, S.T., M.Si 97.019.064.0-805.000 Rekening : 1302010000507581	Jasa Administrasi - Perjanjian/Perikatan Kerja (Kantor) / Tenaga Kontrak	1.500.000	x 1		1.500.000	36.433	85.500			1.378.067	2 
	JUMLAH					3.000.000	72.866	171.000			2.756.134	

TERBILANG: TIGA JUTA RUPIAH

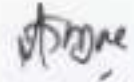
Makassar, 22-08-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAN NISWAN HUNGKASA, ST, M.AP
 NIP. 197304252005021001

KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAERAH SELAKU PPTK

DODY AGRİYANTO, S.Sos., M.Si
 NIP. 19741216 199311 1 001

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
 NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR

FIRNAWATI, SE
 NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Tanggal: 21.08.2024
Waktu: 11:47:43

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing

MD-00211304790

Tanggal Billing

21.08.2024 11:47:35

Tanggal Kuitansi

28.08.2024 11:47:35

Status

Belum Dibayar

Keterangan

PPH 1% Atas Tenaga Kerja Raltungda Kota Makassar untuk Sutan Agustina YAJ2024

Data Pembayaran Tagihan

Waktu Bayar

Saldo Perhitungan dan Penghitungan Dasar Kota Mks

NPWP: 0025720030003

Pembuat Billing

BAGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTAMKS

Keterangan (Lampiran)

100 - BEK/PAJPA LAMBA NEGARA

Unit Satuan 1

50 - PENGELUARAN TRANSKASI KHUSUS

Saluran Kerja

443710 - PENGEMALAN PERHIMPUNAN FILM KETICA (PPK)

Uraian

Kab/Kota KOTA MAKASSAR

Periode AGUSTUS 2024

NPWP

N/A

NPWP

N/A

Tanggal Bayar

N/A

Bank/Pos Bayar

N/A

Kontak Bayar

Akuan

91151

72.885.39

Tarif Dasar

100 72.885.39

(Tupai Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Tagihan: 0025720030003
2. Periode: 21.08.2024
3. Periode: 21.08.2024
4. Periode: 21.08.2024
5. Periode: 21.08.2024
6. Periode: 21.08.2024
7. Periode: 21.08.2024
8. Periode: 21.08.2024
9. Periode: 21.08.2024
10. Periode: 21.08.2024

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT



Teller : Nurul ahsaniva

Cabang : Kantor Kas Balikpapan MKS

No Resi : 005774

Bulan Iuran : 11/2031
 Nomor : 17035601000 / 240801107771
 Pembayaran :
 Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Perusahaan : DAERAH KOTA MAKASSAR
 Nomor NPP : 17035601
 Kode Divisi : 000
 Jumlah Iuran : Rp.171.000,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
 E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
 Struk Ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
 Terima Kasih.

BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT



Teller : Nurul ahsaniva

Cabang : Kantor Kas Balikpapan MKS

No Resi : 305774

Bulan Iuran : 11/2031
 Nomor : 17035601000 / 240801107771
 Pembayaran :
 Nama : NON PNS BADAN PENELITIAN DAN
 Perusahaan : PENGEMBANGAN DAERAH / KOTA MAKASSAR
 Nomor NPP : 17035601
 Kode Divisi : 000
 Jumlah Iuran : Rp.171.000,00

Status Pembayaran Anda Bisa Dilihat di email & Portal
 E-Payment BPJS Ketenagakerjaan.
 Struk Ini Merupakan Bukti Pembayaran Yang Sah.
 Terima Kasih.

BANK SULSELBAR

BUKTI PENERMAAN NEGARA
PENERMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 23-08-2024 16:41:59	NTE	: 000000102825
Tanggal Buku	: 26-08-2024	NTPN	: 0E7491GCA1686L36
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 102825

DATA SETORAN :

Kode Blang	: 702408211354790		
Nama Wajib Bayar	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Mks		
Kementerian/Lembaga	: 999		
Unit Eselon	: 99		
Satuan Kerja	: 440780		
Jumlah Setoran	: 72.866	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah		

This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan computer dan tidak memerlukan tanda tangan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassar.go.id, Pos-el sekda@makassar.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR: 346/SETDA/188.4/TAHUN/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS
RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu adanya Tenaga Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2023);
8. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayanan Publik yang berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor : 3475/188.4.45/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk 2 (dua) Orang Non ASN Tenaga Administrasi pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksana Peraturan pada Kantor pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Kepada 2 (dua) Orang Non ASN Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Belanja Jasa Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan pada Kantor Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi:

1.500,000,00 /Orang/Bulan

b. Belanja Iuran/ Jaminan asuransi:

1. Kesehatan : Rp141.000,00/Orang/Bulan

2. Kecelakaan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan

3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan

- KETIGA : Pemberian Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi serta Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Peraturan pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, akan diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Januari 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

FIRMAN HAMID PAGARRA

Tembusan.:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/19/KEP/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS
RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
18. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor

tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;

19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 346/SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada badan penelitian dan pengembangan daerah kota makassar tahun anggaran 2024 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIK	JABATAN
1	SINTIA YULIANTI, ST, M. SI	7371125207840004	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN
2	SRI WINARTY B. MANGAWEANG, S. Kep	7371024612860003	LASKAR PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEDUA : Pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Januari 2024
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



NIRWAL NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730426 200502 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala DPKAD Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.